

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA SIBOLGA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA**

Nomor : 69/PKS/RRI-SBG/08/2024

Nomor :

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (26-08-2024) bertempat di Sibolga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YANNI PETER LATUHERU, S.Sos**
Jabatan : Kepala LPP RRI Sibolga
Alamat : Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.11, Simare-Mare, Kec.
Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara
e-mail / Telp : rrisbg.lpu@gmail.com / (0631) 22506
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUFRI SIREGAR**
Jabatan : Jurusita Pengganti
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.1
e-mail / Telp : pengadilanagamasibolga@gmail.com / 0812 6316 3978
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa Adlibs Pemanggilan Peserta Sidang Nomor:124/Pdt.G/2024/PA.Sbga sebanyak 1 Kali siar yang disiarkan melalui Programa 1 LPP RRI Sibolga, Periode 26 Agustus 2024.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan Dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus LPP RRI yang bersifat mendesak;
3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 27 Agustus 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
3. Jatuh tempo pembayaran tanggal 19 September 2024.

Pasal 5

TARIF

1. Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
2. Jasa Penyiaran :
3. Adlibs Pemanggilan Peserta Sidang Nomor: 124/Pdt.G/2024/PA.Sbga sebanyak 1 kali siar (Prime Time) periode 26 Agustus 2024 : 1 x Rp 45.000,- = Rp45.000,-
4. Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6

DENDA

1. **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
3. sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

2. Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Sibolga,



YANNI PETER LATUHERU, S.Sos

PIHAK KEDUA
Jurusita Pengganti



SUFRI SIREGAR

RELAAS PANGGILAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Pada hari ini tanggal, Saya Danil Isnadi. S.H.I., sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Sibolga atas perintah Ketua majelis dalam perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Sbga Tanggal 21 Agustus 2024;

TELAH MEMANGGIL

Zendra Satria Tampubolon bin Khaidir Tampubolon, NIK 1273022607890001, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 26 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hiu, Nomor 17, Lingkungan II, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambat, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sibolga pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 23 Desember 2024;

Pukul : 09.00 WIB;

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Sibolga;
Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Gustina Sari binti Syahrin, sebagai Penggugat;
melawan

Zendra Satria Tampubolon bin Khaidir Tampubolon, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Sibolga;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Penanggung Jawab Radio RRI Sibolga

[Handwritten Signature]
Hj. Rosmahwati Hurnani SE
NIK 198608231989032001

